



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2013

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

11. Undang-Undang.....3

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah.....4

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
26. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Ketentuan umum Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah.....5

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bungo yang dibuat oleh Bupati dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah dan atau peraturan lainnya yang lebih tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
9. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur dengan misi SKPD.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

Tahun Anggaran 2013 meliputi masa 1 (satu) tahun mulai dari tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.

1. Pendapatan :

a. Semula	Rp.	946.265.384,035,03
b. Bertambah	Rp.	<u>48.288.511.672,71</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	994.553.895.707,74

2. Belanja :

a. Semula	Rp.	1.051.265.384.035,03
b. Bertambah	Rp.	<u>46.974.876.246,41</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	1.098.240.260.281,44
Defisit Setelah Perubahan	Rp.	(103.686.364.573,70)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan		
1. Semula	Rp.	105.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>2.582.098.631,07</u>
Jumlah Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	107.582.098.631,07
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah	Rp.	<u>3.895.734.057,37</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	3.895.734.057,37

Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) Rp.0,00

Pasal 3

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II dan Peraturan Bupati Ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6.....7

Pasal 6

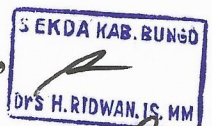
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

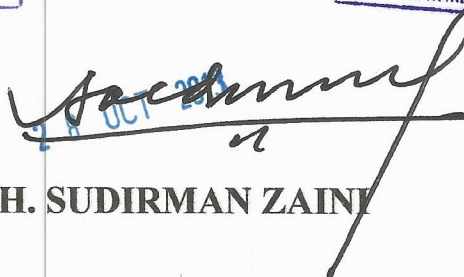
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 30 SEPTEMBER 2013



BUPATI BUNGO,




H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO


H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2013 NOMOR 795

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA							
		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
1.20 . 1.20.38	BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	1.703.258.762,00	1.355.580.000,00	3.058.838.762,00	2.047.101.120,00	1.595.094.500,00	3.642.195.620,00	583.356.859,00	19,07
1.21	Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	599.536.321,00	1.296.317.600,00	1.895.853.921,00	627.386.106,00	1.304.517.600,00	1.931.903.706,00	36.049.785,00	1,90
1.21 . 1.21.01	KANTOR KETAHANAN PANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	599.536.321,00	1.296.317.600,00	1.895.853.921,00	627.386.106,00	1.304.517.600,00	1.931.903.706,00	36.049.785,00	1,90
1.22	Pembudayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	5.977.335.072,00	4.806.488.425,00	10.783.823.497,00	5.964.964.162,00	7.529.832.195,00	13.494.796.357,00	2.710.972.860,00	25,14
1.22 . 1.22.02	BADAN PEMBUDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEMBUDAYAAN PEREMPULAN DAN KB	0,00	0,00	0,00	0,00	5.977.335.072,00	4.806.488.425,00	10.783.823.497,00	5.964.964.162,00	7.529.832.195,00	13.494.796.357,00	2.710.972.860,00	25,14
1.24	Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.680.000,00	17.680.000,00	0,00	17.680.000,00	17.680.000,00	0,00	0,00
1.24 . 1.26.01	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.680.000,00	17.680.000,00	0,00	17.680.000,00	17.680.000,00	0,00	0,00
1.25	Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.096.000,00	538.096.000,00	0,00	538.096.000,00	538.096.000,00	0,00	0,00
1.25 . 1.07.01	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.096.000,00	538.096.000,00	0,00	538.096.000,00	538.096.000,00	0,00	0,00
1.26	Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	577.006.340,00	1.223.640.000,00	1.800.646.340,00	569.126.815,00	1.263.440.000,00	1.832.566.815,00	31.920.475,00	1,77
1.26 . 1.26.01	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	0,00	0,00	0,00	0,00	577.006.340,00	1.223.640.000,00	1.800.646.340,00	569.126.815,00	1.263.440.000,00	1.832.566.815,00	31.920.475,00	1,77
2	Urusan Pilihan	514.550.000,00	514.550.000,00	0,00	0,00	24.816.452.809,00	40.540.805.100,00	65.357.257.909,00	24.117.995.375,00	45.138.951.339,00	69.256.946.714,00	3.899.688.805,00	5,97
2.01	Pertanian	503.300.000,00	503.300.000,00	0,00	0,00	18.310.142.038,00	21.959.699.550,00	40.269.841.588,00	17.842.411.217,00	23.124.810.450,00	40.967.221.667,00	697.380.079,00	1,73
2.01 . 2.01.01	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	123.800.000,00	123.800.000,00	0,00	0,00	3.207.506.898,00	7.362.486.200,00	10.569.993.098,00	3.220.758.004,00	7.362.486.200,00	10.583.244.204,00	13.251.106,00	0,13
2.01 . 2.01.02	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETUTANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	12.064.097.129,00	3.319.405.900,00	15.383.503.029,00	11.538.060.513,00	3.381.203.900,00	14.919.264.413,00	(464.238.616,00)	(3,02)
2.01 . 2.01.03	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	379.500.000,00	379.500.000,00	0,00	0,00	3.038.538.011,00	3.741.733.050,00	6.780.271.061,00	3.083.592.700,00	3.813.873.050,00	6.887.466.750,00	117.194.689,00	1,73
2.01 . 2.02.01	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.536.074.400,00	7.536.074.400,00	0,00	8.567.247.300,00	8.567.247.300,00	1.031.172.900,00	13,68
2.02	Ketahanan	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437.361.346,00	4.357.449.599,00	8.794.810.945,00	4.136.500.885,00	5.240.034.249,00	9.376.535.134,00	581.724.189,00	6,61
2.02 . 2.02.01	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437.361.346,00	4.357.449.599,00	8.794.810.945,00	4.136.500.885,00	5.240.034.249,00	9.376.535.134,00	581.724.189,00	6,61
2.03	Energi dan Sumberdaya Mineral	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	2.068.946.425,00	5.839.843.250,00	7.908.792.675,00	2.139.083.273,00	6.775.550.390,00	8.914.633.663,00	1.005.840.988,00	12,72
2.03 . 2.03.01	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	2.068.946.425,00	5.839.843.250,00	7.908.792.675,00	2.139.083.273,00	6.775.550.390,00	8.914.633.663,00	1.005.840.988,00	12,72
2.04	Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.312.200,00	778.312.200,00	0,00	778.312.200,00	778.312.200,00	0,00	0,00
2.04 . 1.17.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.312.200,00	778.312.200,00	0,00	778.312.200,00	778.312.200,00	0,00	0,00
2.05	Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487.380.500,00	5.487.380.500,00	0,00	6.831.280.500,00	6.831.280.500,00	1.343.900.000,00	24,49
2.05 . 2.01.03	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487.380.500,00	5.487.380.500,00	0,00	6.831.280.500,00	6.831.280.500,00	1.343.900.000,00	24,49
2.06	Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.126.500,00	696.126.500,00	0,00	879.640.550,00	879.640.550,00	183.514.050,00	26,36
2.06 . 1.15.01	DINAS KOPERASI, UMUM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.126.500,00	696.126.500,00	0,00	879.640.550,00	879.640.550,00	183.514.050,00	26,36
2.07	Industri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.505.001,00	882.505.001,00	0,00	669.834.500,00	669.834.500,00	(212.670.501,00)	(24,10)
2.07 . 1.15.01	DINAS KOPERASI, UMUM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.505.001,00	882.505.001,00	0,00	669.834.500,00	669.834.500,00	(212.670.501,00)	(24,10)
2.08	Keremajaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.488.500,00	539.488.500,00	0,00	839.488.500,00	839.488.500,00	300.000.000,00	55,61
2.08 . 1.13.02	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.488.500,00	539.488.500,00	0,00	839.488.500,00	839.488.500,00	300.000.000,00	55,61
JUMLAH		946.265.384.035,03	994.553.895.707,74	48.288.511.672,71	5,10	539.159.997.570,00	512.105.386.465,03	1.051.265.384.035,03	526.953.432.398,00	571.266.827.883,44	1.098.240.260.281,44	46.974.876.246,41	4,47

TGL. TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN

KASUBAG FUP

KASUBAG HOKUM

HAMBALISH

RAHMAD HARIJADI, SH

NIP.19760416200211005

NIP.196509101593031004

TELAH DITELITOLEH

KABID ANGGARAN DIPKAD

KEPALA DINAS DIPKAD

PADA TGL.

PADA TGL.

YUSRAIS SE

ROZALISME

NIP.196203190631002

NIP.196203190631078

Muara Bungo, 30 September 2013

WABUP BUNGO BUPATI BUNGO

S EKDA KAB. BUNGO

H.MASDURI, SH

H.SUDIRMAN ZAINI

NIP.196203190631078

NIP.196203190631078

KODE	URATAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		PEGAWAI	JENIS BELANJA		JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	PEGAWAI	JENIS BELANJA		JUMLAH 10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6 (Rp)	%		
			BARANG & JASA	MODAL			BARANG & JASA	MODAL					
1	2	3	4	5		7	8	9					
		8.400.000,00	151.892.000,00	0,00	160.292.000,00	8.400.000,00	151.892.000,00	0,00	160.292.000,00	0,00	0,00		
2.08 . 1.13.02 . 15 . 08	Koordinasi penyelesaian masalah transmigrasi												
2.08 . 1.13.02 . 15 . 13	Pelaksanaan koordinasi program kota terpadu mandiri (KTM)	33.075.000,00	324.621.500,00	21.500.000,00	379.196.500,00	33.075.000,00	624.621.500,00	21.500.000,00	679.196.500,00	300.000.000,00	79,11		
JUMLAH		68.686.768.100,00	209.384.004.732,03	234.034.613.633,00	512.105.386.465,03	69.908.710.100,00	235.864.596.121,93	265.513.561.661,51	571.266.827.883,44	99.181.441.418,41	11,55		

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN
KABUPATEN BUNGO
HAMBALISH
NIP. 197609082008121005

RAHMAD HARIJADI
NIP. 198609101993031004

TELAH DITELIMOLEH
KABUPATEN BUNGO
NIP. 19691203121002

ROZALISE ME
NIP. 19810317198011078

Muara Bungo, 30 September 2013
WABUP BUNGO
H. MASJURI SR. NIP. 194509101945091001
H. SUDIRMAN ZAINI NIP. 194509101945091001

KODE		URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
1		2	3	4	JUMLAH (Rp)	%
06	1	04	762.896.500,00	502.570.000,00	(260.326.500,00)	(34,12)
07		Perumahan				
07		KESEHATAN	134.292.986.256,00	138.284.037.993,00	3.991.051.737,00	2,97
07	1	02	132.470.541.756,00	136.454.005.993,00	3.983.464.237,00	3,01
07	1	12	1.822.444.500,00	1.830.032.000,00	7.587.500,00	0,42
08		Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera				
08		PARIWISATA DAN BUDAYA	5.417.786.327,00	5.628.026.777,00	210.240.450,00	3,88
08	1	17	4.639.474.127,00	4.849.714.577,00	210.240.450,00	4,53
08	2	04	778.312.200,00	778.312.200,00	0,00	0,00
10		Pariwisata				
10		PENDIDIKAN	366.575.998.709,00	365.762.182.353,00	(813.816.356,00)	(0,22)
10	1	01	361.321.601.179,00	359.618.454.348,00	(1.703.146.831,00)	(0,47)
10	1	18	3.453.751.190,00	4.311.161.190,00	857.410.000,00	24,83
10	1	26	1.800.646.340,00	1.832.566.815,00	31.920.475,00	1,77
10		Perpustakaan				
11		PERLINDUNGAN SOSIAL	24.114.177.041,00	25.281.970.363,00	1.167.793.322,00	4,84
11	1	10	5.105.274.269,00	6.033.722.287,00	928.448.018,00	18,19
11	1	11	1.409.831.000,00	1.409.831.000,00	0,00	0,00
11	1	13	17.599.071.772,00	17.838.417.076,00	239.345.304,00	1,36
11		Sosial				
			1.051.265.384.035,03	1.098.240.260.281,44	46.974.876.246,41	4,47

TELAH DITELITISESAI KETENTUAN
Tgl. 19/09/2013
SUBSTANSI
RAHMAD HARIJADI,SH
NIP.15860910193031004

TELAH DITELITIOLEH
KABID ANGGARAN DEPKAM
PADAT LCL
KEMALIA BANG DEPKAM
PADAT LCL
ROZALISME
NIP.1868231190031028

Muara Bungo, 30 September 2013
WABUP BUNGO
H. SUDIRMAN ZALINI
BUPATI BUNGO
Drs H. RIDWAN, SH, MH
S EKDA JAB. BUNGO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.18	Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Migas	255.018.750,00	242.608.750,00	(12.410.000,00)	(4,87)	
2.03.2.03.01.18.02	Pembinaan teknis pangkalan minyak SPBU	100.535.950,00	100.535.950,00	0,00	0,00	
2.03.2.03.01.18.02.5.2.1	Belanja Pegawai	56.700.000,00	56.700.000,00	0,00	0,00	
2.03.2.03.01.18.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.835.950,00	43.835.950,00	0,00	0,00	
2.03.2.03.01.18.03	Pembinaan teknis LPG	154.482.800,00	142.072.800,00	(12.410.000,00)	(8,03)	
2.03.2.03.01.18.03.5.2.1	Belanja Pegawai	8.680.000,00	8.680.000,00	0,00	0,00	
2.03.2.03.01.18.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	145.802.800,00	133.392.800,00	(12.410.000,00)	(8,51)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.897.542.675,00)	(8.903.383.663,00)	(1.005.840.988,00)	12,74	

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN

YTL. KASUBKAS

HAMBAL,SH

RAHMAD HARIJADI

9760482002121005

9760482002121005

TELAH DITELITI

KABID ANGGARAN DEPKAD

PADA TEL:

KEPALA DINAS DEPKAD

PADA TEL:

FOZALIS,ME

9760482002121002

9760482002121002

Muara Bungo, 30 September 2013

WABUP BUNGO

H.MASRUKI,SP,ME

BUPATI BUNGO

S.EKDA KAS. BUNGO

H.SUDIRMAN ZAINI

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6		
2.2	BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal	474.461.013.566,03	529.315.152.294,44	54.854.138.728,41	11,56		
2.2.1		65.659.182.100,00	66.712.679.100,00	1.053.497.000,00	1,60		
2.2.2		192.950.925.033,03	210.026.979.572,93	17.076.054.539,90	8,85		
2.2.3		215.850.906.433,00	252.575.493.621,51	36.724.587.188,51	17,01		
		SURPLUS / (DEFISIT)					
		(43.053.724.292,00)	(38.111.243.609,70)	4.942.480.682,30	(11,48)		
3	PEMBIAYAAN DAERAH						
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	105.000.000.000,00	107.582.098.631,07	2.582.098.631,07	2,46		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	105.000.000.000,00	107.397.098.631,07	2.397.098.631,07	2,28		
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00		
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	3.895.734.057,37	3.895.734.057,37	0,00		
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	3.895.734.057,37	3.895.734.057,37	0,00		
PEMBIAYAAN NETTO		105.000.000.000,00	103.686.364.573,70	(1.313.635.426,30)	(1,25)		
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		61.946.275.708,00	65.575.120.964,00	3.628.845.256,00	5,86		

TELAH DITELITIOLEH
KABID ANGGARAN DPRD
PADA TGL: 
NIP. 97069242003121002

TELAH DITELITIOLEH
KEPALA DAERAH DPRD
PADA TGL: 
NIP. 105612311980031078

MASJURI, SP.ME

NIP. 105612311980031078

Muara Bungo, 30 September 2013

YABUP BUNGO
BUPATI BUNGO


Drs H. RIDWAN ISJUMI

H.SUDIRMAN ZAINI

TELAH DITELITIOLEH
TGL. 
KASUBDA

TELAH DITELITIOLEH
TGL. 
KASUBDA HUKUM

RAHMAD HARIJADI, SH
NIP. 197504200201005

RAHMAD HARIJADI, SH
NIP. 197504200201005